



Sinopsis

Judul : PERAN POLISI WANITA DALAM POLMAS BERBASIS GENDER
Penulis : PROF. DRS. ADRIANUS ELIASTA SEMBIRING MELIALA, M.SI., M.SC., PH.D

Konsep polmas di Indonesia berawal dari Reformasi 1998 yang mengubah wajah Polri setelah terpisah dari ABRI. Polri yang tadinya menjadi bagian dari militer, kini tidak lagi demikian. Hukum sipil berlaku bagi aparat kepolisian. Polmas di berbagai negara memang memiliki tantangannya masing-masing. Di Indonesia, konsep Polisi Masyarakat (Polmas) muncul karena fakta di lapangan bahwa SDM Kepolisian yang terbatas tidak mungkin mengamankan masyarakat secara solitair atau seorang diri. Kendala geografi yang luas serta populasi masyarakat Indonesia yang besar juga memaksa kepolisian untuk menggandeng masyarakat guna turut memelihara kamtibmas di wilayah masing-masing.

Sejalan dengan itu, fungsi-fungsi Polmas membutuhkan peran yang berorientasi pada pelayanan masyarakat tanpa melupakan *core business* Polri yakni penegakkan hukum. Konsep Polmas ini dengan demikian sangat menjanjikan bagi komunitas perempuan, baik bagi personel Polwan sendiri maupun perempuan pada umumnya. Ini dikaitkan dengan aspek-aspek feminin kepolisian yang amat dibutuhkan dalam rangka berhasilnya tugas Polmas. Adapun Polwan yang telah terbukti memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan fungsi Polmas dengan baik dapat dikirim ke luar negeri untuk studi banding tentang peran Polwan saat menjalankan Polmas berbasis gender.

Dengan adanya pemahaman fungsi Polmas berbasis gender tersebut, Polwan diharapkan dapat menjadi pihak yang pro-aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Prinsipnya adalah, Polwan mampu “menjemput bola”, tidak hanya menunggu tindakan atau komando dari polisi laki-laki. Polwan juga mesti menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah, dengan ciri khas tersendiri yakni sebagai wanita seutuhnya dan melakukan fungsi Polmas sepenuhnya.

NI KADEK RAFIKA DEWI, SE
SERDIK SPPK – POKJAR III
NO SERDIK: 202409002034